



# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

## BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Alamat : Jl. Soa Sio Lantai II Kantor Guernur Papua Email: [Pegadaan@papua.go.id](mailto:Pegadaan@papua.go.id)

### KEPUTUSAN

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR : 188.4/344a/RO-PBJ/2021**

### TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA**  
**TAHUN 2019 - 2023**

### KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengukuran Kinerja perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro.
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);


12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Periode 2019 – 2023 sebagaimana terlampir;
- Kedua : IKU Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2023 masa berakhirnya RPJMD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 19 Februari 2021

KEPALA BIRO,  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI PAPUA



YOREM B. WANIMBO, S.Pi, MM  
PEMBINA  
NIP. 19700118 199203 1 006

Lampiran I  
Keputusan Kepala Biro Pengadaaan Barang dan Jasa  
Nomor : **188.4/344a/RO-PBJ/2021**  
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA  
PERIODE 2019 – 2023**

1. Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rencana kerja Biro;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengembangan pengelolaan Sistem Layan`an Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  - f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan analisis hukum dan jawaban terhadap sanggahan calon penyedia barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - g. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - h. Penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah paket selesai tender/seleksi}}{\text{Jumlah dokumen yang diproses}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan barang dan Jasa	LPSE, Pokja
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	$\frac{\text{Jumlah Hasil Negosiasi}}{\text{Jumlah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan barang dan Jasa	LPSE, Summury report Pokja
		Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Aplikasi lokal PBJ	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)}}{\text{Jumlah total SKPD}} \times 100\%$	Bagian LPSE/ Bagian Pengadaan barang dan Jasa	Aplikasi singa2.papua.g o.id dan aplikasi Sirup LKPP
			$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)}}{\text{Jumlah total pelaku usaha papua yang terdaftar dalam aplikasi pelaku Usaha Papua}} \times 100\%$	Bagian LPSE	Aplikasi Pelaku Usahapapua.g o.id
2	Meningkatnya Profesional SDM Biro PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	$\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus ujian jabatan fungsional PBJ}}{\text{Jmlh formasi jabatan fungsional}} \times 100\%$	Bagian Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	Hasil Ujian Kompetensi
		Persentase Sanggahan/pengaduan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sanggahan yang terselesaikan}}{\text{Jmlh paket tender/seleksi yang disanggah}} \times 100\%$	Bagian Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ	Jawaban sanggah
3	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai dan Predikat SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Inspektorat Prov.Papua	Inspektorat Prov.Papua

Jayapura, 19 Februari 2021


 KEPALA BIRO  
 PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SETDA PROVINSI PAPUA  
**YOREM B. WANIMBO, S.Pi., MM**  
 PEMBINA  
 NIP. 19700118 199203 1 006